

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Hubungan internasional merupakan interaksi antar aktor yang tindakannya memiliki konsekuensi penting terhadap faktor lain dari luar yurisdiksi efektif unit politiknya (Perwita, dan Yani. 2005:7). John Ghazvinian, Direktur *Middle East Center* dan pakar hubungan Iran-Amerika Serikat dari Universitas Pennsylvania dalam kolom *Penn Today* menjabarkan perjalanan sejarah Amerika Serikat dan Iran sejak zaman Shah Pahlavi hingga sekarang. Amerika Serikat dan Iran memiliki hubungan yang sangat lama. Dia menjabarkan ada kecenderungan di antara orang-orang yang mempelajari sejarah ini untuk terpaku pada dua tanggal yaitu 1979 dan 1953. Yang pertama adalah krisis penyanderaan Iran ketika mahasiswa radikal menyerbu kedutaan Amerika Serikat dan menyandera personel diplomatik Amerika selama lebih dari setahun, dan yang terakhir adalah tahun di mana kudeta yang didukung CIA terhadap Perdana Menteri Mossadegh yang populer dan terpilih secara konstitusional. Iran telah menjadi sekutu dekat Amerika Serikat pada 1950-an dan 1960-an juga, tetapi pada 1970-an aliansi itu menjadi jauh lebih kuat. Itu terjadi bertepatan pada saat pemerintahan Shah menjadi semakin diktator, serta saat sejumlah besar uang mengalir ke pundi-pundi Iran setelah embargo minyak Arab 1973, yang tidak sepenuhnya diamati dan

diuntungkan oleh Iran secara finansial. Dengan ekonomi yang semakin korup, penguasa yang semakin diktator dan hubungan yang erat dengan para elit tersebut kepada Amerika Serikat. Serta ditahun tersebut terjadi politik Islam dan peningkatan yang sangat religius membuat faktor-faktor diatas digabungkan menjadi sebuah fenomena yang kita sebut sebagai Revolusi Islam di tahun 1979. Revolusi yang tidak dimulai dengan maksud sebagai anti Amerika Serikat, hal tersebut mudah dilupakan oleh Iran tetapi revolusi yang terjadi akibat perlawanan terhadap Shah dan Shah terkait erat dengan Amerika Serikat dan dianggap berhutang kepada CIA dalam tahtanya dikarenakan dukungan Amerika Serikat di saat itu tahun 1970-an. Sedangkan di era administrasi Trump ada kecenderungan bahwa administrasi Trump terpaksa untuk memerangi dan pergantian rezim di Iran. Maka kebijakan negara biasanya mengalami perubahan sesuai dengan kepentingan nasional yang diatur oleh pemerintahan yang sedang berkuasa (Tri, Wahyuni. 2013;1). Dengan pandangan bahwa administrasi Trump memberi tekanan yang signifikan untuk mencapai titik dimana Iran akan menyerah dan memberikan kesempatan untuk bernegosiasi ulang kembali dengan perjanjian yang lebih memberikan keuntungan, keuntungan untuk Amerika Serikat agar Trump memperoleh kejayaan dan menyatakan Obama lemah. (<https://penntoday.upenn.edu/news/history-us-iran-relations> Diakses pada 12.57 WIB, 28 Mei 2022.)

Presiden Amerika Serikat sebagai pemangku kebijakan luar negeri Amerika Serikat menjadi aktor yang berpengaruh dalam pembentukan dan pelaksanaannya. Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat mempunyai

pandangan yang berbeda dari Presiden Amerika Serikat sebelum Trump. Pada era Obama, Amerika Serikat dibawah di Obama melakukan pendekatan yang sangat diplomatik dibandingkan Trump, seperti melakukan pesan untuk hari perayaan besar Iran dan juga melakukan kunjungan negara-negara Islam adapun juga dengan bukti perancangan JCPOA ataupun (*Joint Comprehensive Plan of Action*) yang digagas oleh Gedung Putih dan didukung oleh sekutu Amerika Serikat merupakan salah satu usaha diplomasi Presiden Obama. Pada saat perjanjian, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Obama saat itu menyatakan keyakinannya bahwa JCPOA akan mencegah Iran membangun program nuklir secara rahasia. Iran, katanya, telah berkomitmen untuk "pemantauan, verifikasi, dan inspeksi yang luar biasa kuat". (<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-33521655> diakses pada 11.15 WIB, 28 Mei 2022.)

Berbeda dengan Trump, Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan menarik diri dari JCPOA dan memberlakukan kembali sanksi nuklir Amerika Serikat terhadap rezim Iran dikarenakan Iran dituduh melakukan kecurangan dengan melanggar perjanjian tersebut. Meskipun Iran telah memverifikasi kepatuhan terhadap perjanjian tersebut, Amerika Serikat secara sepihak menarik diri dari JCPOA pada 8 Mei 2018 dan kemudian memberlakukan kembali semua sanksi Amerika Serikat terhadap Iran yang dicabut oleh perjanjian tersebut. Sayangnya untuk penyusun INARA (*Iran Nuclear Agreement Review Act*) yang diikuti dengan pembentukan JCPOA, Iran tidak curang adapun sebaliknya, bagaimana seorang Presiden Amerika Serikat (Trump) dari partainya sendiri yang curang (Simon, S.2018.).

Tetapi tampaknya dunia internasional banyak menangkap persepsi tentang Donald Trump dan dengan demikian tentang Amerika Serikat saat ini. Secara global, persetujuan kepemimpinan atau *approval rating* Trump secara substantif lebih rendah dibandingkan dengan para pemimpin Amerika Serikat sebelumnya, seperti Obama, Bush, dan Clinton. Peringkat persetujuan kepemimpinan Trump di seluruh dunia turun 10 poin persentase atau lebih dari level era Obama di hampir setengah (48,5%) negara yang disurvei pada tahun 2017 – banyak dari mereka adalah mitra dan sekutu Amerika Serikat (Ziv, R., Graham, A., & Cao, L. 2019.)

Trump di gedung putih tidak terlepas dengan Partai Republik dalam dukungannya. Partai Republik berdiri dengan tujuan menolak perbudakan, meskipun para pendirinya menolak untuk mengakui hak negara bagian dan teritori untuk mempraktikkan perbudakan, Partai Republik modern mendukung hak-hak negara bagian melawan kekuasaan pemerintah federal dalam banyak kasus dan menentang peraturan federal tentang masalah-masalah negara bagian dan lokal, seperti kepolisian dan pendidikan. Banyak Republikan, meskipun tidak semua, mendukung peningkatan peraturan pemerintah tentang kehidupan pribadi nonekonomi warga di beberapa bidang, meskipun sebagian besar Republikan juga sangat menentang undang-undang kontrol senjata dan menentang pengakuan hukum atas hak yang sama untuk gay dan lesbian dan cenderung menentang regulasi ekonomi pemerintah yang ekstensif, program sosial yang didanai pemerintah, tindakan afirmatif dan kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat hak-hak pekerja. Mengenai kebijakan luar negeri, Partai Republik secara tradisional telah mendukung pertahanan nasional yang kuat dan pengejaran agresif

kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat, bahkan ketika hal itu memerlukan tindakan sepihak atau bertentangan dengan pandangan masyarakat internasional (<https://www.britannica.com/topic/Republican-Party> diakses pada 13.54 WIB, 28 Mei 2022.)

Dengan pemikiran konservatif dan beberapa DPR serta Senat Amerika Serikat yang berpandangan isolatif membuat Amerika Serikat dalam pandangan Partai Republik menjadi pandangan utama, seperti pandangan Trump saat menjabat menjadi Presiden, Republikan mendukung kebijakannya yang lebih agresif kepada Iran. Disetipa kritik yang dilemparkan kepada Donald Trump, Administrasi nya dan juga Partai Republikan selalu membela dan membenarkan aksinya. Bagi banyak kaum konservatif, kesepakatan Iran merupakan simbol dari apa yang mereka pandang sebagai kebijakan luar negeri Barack Obama yang sembrono, dan Trump mahir menyalurkan kemarahan konservatif pada mantan Presiden Obama (Albarasneh, A.S. dan Khatib, D.K., 2019.)

Trump yang mampu menjadi pusat para konservatif dimana semua kebijakan yang dibuatnya menjadi hal utama betapa pengaruhnya Trump dalam masyarakat dan juga para DPR dan Senat dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat. Dengan mencoba menggambarkan Obama menjadi orang yang lemah, tidak kepercayaan kepada administrasi sebelumnya membuat Trump mencoba menghancurkan atau mengubah apa yang dicapai Administrasi Obama. Karena Trump terlihat tidak mempercayai siapapun terlebih lagi pada pemerintah Iran dengan mengeluarkan diri sepihak dan menuduh Iran tidak mengikuti perjanjian JCPOA yang didasari tanpa bukti serta tidak memberi tahu para sekutu Eropa dan

bergerak sendiri dalam melakukan kebijakan luar negerinya dengan lingkungan para penasihat, seperti Mike Pompeo sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di Administrasi Trump yang mengatakan sanksi kuat dan tekanan ekonomi serta militer menjadi kunci dalam menangani Iran. (Nicole Gaouette and Laura Koran, CNN. Pompeo threatens US will 'crush' Iran through sanctions and pressure campaign. 21 Mei 2018 .<https://edition.cnn.com/2018/05/21/politics/pompeo-iran-speech/index.html> diakses pada 16.17 WIB, 28 Mei 2022).

Dunia juga dikejutkan oleh Trump dengan keputusannya untuk membunuh Jenderal Qasem dalam pernyataan langsung dari Mar-a-Lago tempat resor Trump di Florida saat ia memberi pers dan website Departemen Pertahanan Amerika Serikat menjabarkan atas arahan Presiden Trump, militer Amerika Serikat telah mengambil tindakan defensif yang tegas untuk melindungi personel Amerika Serikat di luar negeri dengan membunuh Qasem Soleimani, kepala Pasukan Pengawal Revolusi Islam-Quds, sebuah Pasukan militer yang ditunjuk oleh Amerika Serikat sebagai Organisasi Teroris. Jenderal Soleimani dituduh oleh Amerika Serikat secara aktif mengembangkan rencana untuk menyerang diplomat Amerika dan anggota layanan di Irak dan di seluruh wilayah sekitar negara tersebut. Dan juga dikatakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Jenderal Soleimani dan Pasukan Quds-nya bertanggung jawab atas kematian ratusan tentara Amerika Serikat dan anggota koalisi serta melukai ribuan lainnya. Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, serangan ini bertujuan untuk menghalangi rencana serangan Iran di masa

depan. (<https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/2049534/statement-by-the-department-of-defense/> diakses pada 16.37 WIB, 28 Mei 2022.)

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti sangat tertarik bagaimana faktor idiosinkratik Donald Trump dapat mengubah secara drastis kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang lebih agresif dari pemerintahan sebelumnya. Tentunya peneliti membandingkan kebijakan-kebijakan Donald Trump dengan administrasi sebelumnya.

Dari penelitian yang dibuat oleh M. Bayu Saputra dari Universitas Komputer Indonesia pada tahun 2016 tentang “Faktor Idiosinkratik Raul Castro Dalam Perubahan Hubungan Luar Negeri Kuba – Amerika Serikat (2009-2015)”, penulis menemukan persamaan, yaitu sama-sama meneliti mengenai faktor idiosinkratik masing-masing pemimpin, yaitu jika penulis meneliti mengenai idiosinkratik Donald Trump dalam memimpin Amerika Serikat, penelitian di atas meneliti mengenai idiosinkratik Raul Castro dalam memimpin Kuba.

Dari penelitian yang dibuat oleh Kriesna Adi P dari Universitas Komputer Indonesia pada tahun 2010 tentang “Pengaruh Idiosinkratik Mahmoud Ahmadinejad Terhadap Hubungan Luar Negeri Iran – Amerika Serikat (2005-2008)”, penulis menemukan persamaan, yaitu sama-sama meneliti mengenai faktor idiosinkratik pemimpin negara masing-masing, dalam mengubah kebijakan luar negeri negaranya terhadap Amerika Serikat. Hanya saja, perbedaannya, jika penulis membahas mengenai idiosinkratik Donald Trump dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat saudara Kriesna Adi meneliti mengenai idiosinkratik

Mahmoud Ahmadinejad dalam mengubah kebijakan luar negeri Iran terhadap Amerika Serikat, dan negara yang dibahas terletak di kawasan Timur Tengah.

Dari penelitian yang dibuat oleh Jihan Mahligai Aini dari Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2018 tentang “Faktor Idiosinkratik Ma Ying-Jeou Pada Kebijakan Luar Negeri Taiwan Melalui Three No’s Policy.”, penulis menemukan persamaan, yaitu sama-sama meneliti mengenai faktor idiosinkratik pemimpin negara masing-masing, dalam mengubah kebijakan luar negeri negaranya terhadap China. Hanya saja, perbedaannya, jika penulis membahas mengenai idiosinkratik Donald Trump dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat saudara Jihan Mahligai Aini meneliti mengenai idiosinkratik Ma Ying-Jeou dalam mengubah kebijakan luar negeri Taiwan terhadap China, dan negara yang dibahas terletak di kawasan Asia Timur.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

**”Pengaruh Idiosinkratik Donald Trump dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Terhadap Iran (2016-2020)”**

Penelitian ini didukung oleh beberapa mata kuliah pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, antara lain :

1. Dinamika Politik Internasional, menganalisis bagaimana suatu fenomena internasional melalui kebijakan politik luar negeri. Menganalisa beberapa kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk Iran.



2. Studi Keamanan Internasional. Dalam mata kuliah ini membantu menjelaskan berbagai tindakan yang dilakukan oleh negara dalam interaksinya dengan negara lain serta kebijakan politik luar negeri suatu negara untuk menghadapi perubahan yang terjadi diluar wilayahnya demi mempertahankan keamanan nasionalnya.

3. Analisis Politik Internasional. Mata kuliah yang menganalisis politik internasional dan kebijakan luar negeri yang mendukung politik tersebut sebuah negara terlebih lagi negara besar seperti Amerika Serikat dalam tatanan dunia. Seperti analisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam masa Donald Trump.

## **1.2 Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Rumusan Masalah Makro**

Dari latar belakang, identifikasi masalah yang telah dibahas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana pengaruh idiosinkratik Donald Trump dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Iran pada masa kepemimpinannya?”**

### **1.2.2 Rumusan Masalah Mikro**

Dalam penelitian ini masalah yang dibahas tentu akan berkembang dengan seiring waktu variabel antara variabel akan berhubungan dan berkembang menjadi

masalah yang diteliti. Dengan itu berikut beberapa identifikasi masalah pada penelitian ini.

1. Faktor idiosinkratik apa saja yang terdapat dalam diri Donald Trump yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Iran tahun 2016-2020?
2. Bagaimana respon Iran sebagai reaksi terhadap kebijakan Amerika Serikat dibawah Donald Trump?
3. Perubahan apa yang terjadi dalam hubungan luar negeri Amerika Serikat dan Iran pada masa kepemimpinan Donald Trump?

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini dengan pemaparan latar belakang masalah pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap negara Iran dibawah Presidensi Donald Trump serta pengaruh-pengaruh idiosinkratik serta respon dari Administrasi Trump. Dengan fokus kejadian-kejadian seperti Amerika Serikat keluar dari JCPOA secara sepihak, kampanye sanksi berat Iran, dan pembunuhan Jenderal Qasem yang menyangkut Amerika Serikat dan Iran pada tahun 2016-2020 atau dalam satu periode kepemimpinannya.

## **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini disusun untuk mengetahui dampak idiosinkratik Donald Trump selama menjadi seorang Presiden Amerika Serikat dalam membentuk kebijakan luar negeri serta keputusannya dalam menangani hubungan dengan negara Iran pada tahun 2016-2020.

### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami, mengetahui dan menganalisis apa saja faktor idiosinkratik Donald Trump yang mampu mengubah arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
2. Memahami, mengetahui dan menganalisis bagaimana respon yang diambil oleh Iran dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam kepemimpinan Donald Trump.
3. Menganalisis dan memahami perubahan dalam hubungan luar negeri Amerika Serikat dan Iran pada masa Donald Trump.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Kajian ini diharapkan dapat menambah pemahaman kita tentang keunikan gaya seorang pemimpin yang merumuskan politik luar negeri bangsanya dengan bangsa lain. Dan secara khusus dengan mengacu pada cara-cara yang dipengaruhi

idiosinkratik dimana Donald Trump dalam melakukan hubungan Amerika Serikat dan Iran selama kepresidenannya.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Studi ini dibentuk untuk membantu para sarjana di bidang hubungan internasional mendapatkan perspektif, pengetahuan, dan keterampilan baru, terutama dalam kaitannya dengan cara-cara khusus di mana para pemimpin nasional mempengaruhi kebijakan luar negeri negara mereka di luar negeri. Donald Trump adalah presiden Amerika Serikat dalam situasi ini dengan Iran.

Melihat dan mengevaluasi setiap modifikasi kebijakan luar negeri Amerika terhadap Iran. mengkaji unsur-unsur khas dalam penilaian dan kebijakan Donald Trump terkait perkembangan hubungan luar negeri antara Amerika Serikat dan Iran.